

RINGKASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilu merupakan representasi dari perwakilan rakyat yang memiliki kualifikasi dan latar belakang yang baik sehingga melalui peran lembaga independen KPU memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang membatasi hak politik mantan narapidana korupsi. Pembatasan terhadap kebebasan berkontribusi dalam pemilu bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dan berimplikasi terhadap pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan teknik analisis data menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA 46 P/HUM/2018 bahwa Pemohon merupakan mantan narapidana korupsi dan tidak pernah dicabut hak politiknya akibat berlakunya Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sebuah keniscayaan bahwa pencalonan legislatif berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Berlakunya Putusan MA berimplikasi pada penyelenggaraan *good governance* dalam prinsip partisipasi, yakni keterlibatan rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintah dalam pemilu sekalipun seseorang tersebut merupakan mantan narapidana korupsi, sebagaimana keputusan yang dihasilkan memiliki kesamaan pada konsep negara hukum dan *good governance* dalam menciptakan perspektif Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi dalam peraturan seolah menisyratkan bahwa mantan narapidana tidak bisa dibatasi hak politiknya.

Kata Kunci: Implikasi, Mantan Narapidana Korupsi, *Good Governance*

SUMMARY

The General Election Commission (KPU) carries out general elections (elections) as a means of realizing people's sovereignty in Article 1 paragraph (2) of the 1945 UIR: "Sovereignty is in the hands of the people and is carried out in accordance with basic law". This election is a representation of people's representatives who have good qualifications and background so that through the role of independent institutions the KPU has the authority to make KPU Regulation Number 20 of 2018 concerning Nominations of Members of the House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPRD) of the Province, and Regency/City DPRD which limits the political rights of ex-convicts of corruption. The limitation of freedom to contribute to elections is contrary to the basic principles of the rule of law in Indonesia which upholds human rights which later gave birth to the Supreme Court Decision Number 46 P/HUM/2018 and has implications for the implementation of Good Governance in Indonesia.

The approach method used in this research is normative juridical research. The sources of legal material contained in this study come from primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques based on literature studies and data analysis techniques using deductive methods.

Based on the results of this study that the legal considerations of judges in the MA Decision 46 P/HUM/2018 that the Petitioner is a former convict of corruption and political rights have never been revoked due to the entry into force of Article 4 paragraph (3), Article 11 paragraph (1) letter d and Appendix Model B.3 PKPU Number 20 Year 2018 Concerning Nominations for Members of the House of Representatives, Provincial Regional House of Representatives and Regency/City People's Representative Council which becomes a necessity that legislative nominations come from clean figures and never have a track record of integrity flaws. The validity of the Supreme Court's Decree has implications for the implementation of good governance in the principle of participation, namely the people's involvement in the process of governing the government in an election even though a person is a former convict of corruption, as the resulting decisions have in common the concept of the rule of law and good governance in creating a perspective of Human Rights that is upheld high in the regulations as if implying that ex-convicts cannot be restricted in their political rights.

Keywords: Implications, Former Corruption Inmate, Good Governance.